

G. Daftar Pustaka

- Al Andang. 1998. *Agama yang Berpijak dan Berpihak*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiharto, Bambang. 2008. *Humanisme dan Humaniora*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Susetyo, Benny. 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhfid, Choirul. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1993. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Sutarno. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Th. Sumartana, dkk. 2001. *Pluralisme Konflik dan PA di Indonesia*. Interfidei.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Victor I Tanja. 1998. *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*. Jakarta: Cides.
- W. A. Gerungan. 1991. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco.
- Zamroni. 2007. *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi*. Jakarta: PSAP.

MEMPERKUAT INDONESIA BARU MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

Nasiwan¹

Dosen Fakultas Ilmu Sosial, UNY, email: nasiwan@uny.ac.id

A. Abstrak

Memasuki paruh dekade keenam usia kemerdekaan bangsa Indonesia hingga di penghujung tahun 2012, bangsa ini belum berhasil menuntaskan formulasi tentang satu sistem pendidikan nasional yang disepakati secara permanen oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Indikator tersebut dapat dilihat dari belum adanya konsensus yang permanen tentang formulasi sistem pendidikan nasional yang secara fenomenal dapat dibaca dari munculnya sikap pro dan kontra yang sangat luas menjelang disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Persoalan tersebut jika dilacak lebih jauh akan sampai pada akar persoalan, yaitu belum stabilnya bangunan sistem politik nasional (*floating state*) yang menjadi payung bagi sistem pendidikan nasional.

¹ Nasiwan adalah staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), Universitas Negeri Yogyakarta

Dilihat dari perspektif politik, rumusan tentang konsepsi sistem pendidikan nasional dan *include* di dalamnya Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan produk dari kebijakan politik dari suatu sistem politik. Dalam konteks keterkaitan antara sistem pendidikan nasional dengan sistem politik Indonesia, yang menarik dipertanyakan lebih jauh adalah sistem pendidikan nasional di Indonesia tersebut dirumuskan ulang di tengah berlangsungnya reformasi politik yang sudah berlangsung memasuki satu dasawarsa (1998-2012). Merujuk pada gagasan besar demokrasi, lebih khusus lagi perspektif tentang *civil society*, seharusnya rakyatlah yang memiliki otonomi untuk mengarahkan wacana dan memiliki kata putus tentang bentuk sistem politik nasional termasuk di dalamnya tentang sistem pendidikan nasional yang disepakati oleh rakyat. Negara sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk mengajari kepada rakyatnya (yang lebih sering menjadi proses hegemonisasi) nilai-nilai – prinsip-prinsip kehidupan yang secara elitis dianggap baik. Kegagalan negara Indonesia melalui rezim yang berkuasa untuk mengajari rakyatnya melalui P4 misalnya, selama kekuasaan Orde Baru, memberikan bukti yang kuat akan kebenaran proposisi di atas. Mengikuti alur logika berfikir seperti ini, maka kerja intelektual untuk mengikhtiarkan bagi hadirnya suatu model pendidikan politik yang mampu melahirkan suatu tipe warga negara yang mampu memberikan kontribusi bagi tercapainya suatu konsensus nasional permanen bagi lahirnya suatu sistem politik nasional adalah merupakan sebuah keniscayaan sekaligus langkah strategis untuk terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Prospek pendidikan politik akan sangat dipengaruhi oleh hadirnya pendidikan politik yang mampu melahirkan warga negara yang memiliki budaya politik baru, gagasan inovatif, memiliki sikap kritis pada kinerja sistem politik nasional, serta memiliki loyalitas pada hasil konsensus nasional di negara yang bernama Indonesia baru. Paparan dalam tulisan ini akan mencermati dan menganalisis prospek Pendidikan Politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari reformasi politik nasional yang *include* di dalamnya juga reformasi sistem pendidikan nasional.

B. Pendahuluan

“ Negara (*nation*) yang bernama Indonesia dalam banyak hal, hadir dalam wajahnya sebagai komunitas yang terbayang, proses menjadi (*becoming*) yang belum selesai”²

Mencermati sejarah pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia yang ada di persekolahan khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) maupun yang dilakukan oleh partai politik, baik pada masa pemerintahan Orde Lama maupun pemerintahan Orde Baru sepanjang hampir 40 tahun, proses pendidikan politik memiliki nasib yang sama yaitu lebih sebagai instrumen kekuasaan. Pengalaman buruk pelaksanaan pendidikan politik yang diperalat menjadi sekedar instrumen kekuasaan rezim, dalam waktu yang panjang telah menimbulkan akumulasi dampak negatif yang sangat tragis yaitu: kegagalan pendidikan politik mencapai tujuannya yang sangat mulia untuk melahirkan warga negara yang baik, yang antara lain memiliki sikap loyal (memberikan *support*) kepada sistem politik nasional sekaligus juga memiliki sikap kritis.

Tidak berjalannya fungsi pendidikan politik oleh berbagai institusi politik di Indonesia yang seharusnya menjalankan tugas suci pendidikan politik, termasuk di dalamnya partai politik, diyakini serta secara empiris telah terbukti melahirkan suatu kehidupan partai yang didera berbagai persoalan serius. Berbagai persoalan pelik yang mendera kehidupan politik di Indonesia³ mempertegas tentang urgensi pendidikan politik, termasuk di dalamnya tentang berbagai pilihan strategi-model pendidikan politik.⁴

Jika dicermati perjalanan bangsa Indonesia selama hampir empat dekade lebih, sikap kritis yang berakar pada adanya kemerdekaan berfikir (*liberty*) yang menjadi jantung dari demokrasi telah terpenjara. Pada sisi lain yang lebih dimunculkan adalah sikap loyal yang tidak

² Pernyataan ini diilhami pesan dari tesis utama buku Benedict Anderson, *Imagined Communities*, Insist Press, Yogyakarta, 2001.

³ Lihat, *Prisma* Vol.28. Juni 2009, hal 87-98, khususnya topik tentang “Partai Politik di Persimpangan Jalan” Hasil survei yang dilakukan oleh LP3ES antara lain menemukan bahwa berbagai jenis partai politik seperti partai tradisional, partai dengan idealisme perjuangan, partai tipe organik kontinental yang menganggap masyarakat politik secara keseluruhan sebagai wilayah kerjanya, sudah mulai ditinggalkan masyarakat.

⁴ Lihat, *Kompas 60 Tahun Indonesia Merdeka* edisi 16 Agustus tahun 2006, khususnya topik tentang “Fragmentasi Politik dan Perilaku Parpol”, hal 48.

didasari oleh kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang sistem politik nasional. Kondisi kehidupan politik otoriter yang lebih menekankan loyalitas telah terbukti dengan sangat meyakinkan ikut memberikan kontribusi bagi kemandulan kinerja sistem politik serta ambruknya⁵ bangunan sistem yang otoriter tersebut yang harus diakhiri oleh gerakan reformasi politik,⁶ sejak Mei 1998 hingga tahun 2009 yang juga belum kunjung selesai. Dalam sistem politik yang otoriter, pendidikan (politik) tidak lagi berfungsi untuk melakukan pencerahan pada masyarakat, ia bergeser lebih diposisikan menjadi instrumen pembodohan massal.

Kecenderungan yang ada menunjukkan semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada berbagai lembaga politik yang merupakan bagian dari sistem demokrasi. Indikator menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada salah satu lembaga politik, yakni partai politik, antara lain dapat dilihat pada adanya kecenderungan semakin bertambahnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya. Jika pada Pemilu legislatif tahun 2004 ada 15,03% masyarakat yang mempunyai hak memilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, pada Pemilu legislatif 2009 meningkat menjadi 29,04%.⁷

Kegagalan pendidikan politik termasuk di dalamnya (PKn) dapat dielaborasi lebih rinci lagi, sebagai akibat dari kooptasi dan hegemoni rezim yang otoriter antara lain dapat dilihat pada berbagai fenomena berikut ini;

⁵ Ambruknya bangunan politik Rezim Orde Baru yang dibangun di atas dukungan kekuatan represif militer, politik logistik serta hegemoni ideologi pembangunan pada tanggal 20 Mei 1998, dapat memberikan konfirmasi serta bukti empiris bahwa dengan terkekangnya kebebasan untuk menyampaikan pemikiran kritis atas kinerja pemerintah dalam dinamika kehidupan politik di Indonesia telah menyebabkan matinya mekanisme kontrol yang berfungsi untuk memperbaiki kesalahan atas kinerja sistem politik nasional sehingga tidak sampai terjadi akumulasi kesalahan yang berujung pada timbulnya krisis nasional yang berawal dari krisis kepercayaan pada rezim.

⁶ Gerakan reformasi politik yang dimulai sejak 1998 hingga 2004 untuk mengganti sistem politik ala Orde Baru dengan mesin politik utamanya militer (ABRI), Partai Golkar dan birokrasi yang berselingkuh dengan para teokrat dan pengusaha dari kalangan konglomerat hitam, nampaknya mulai dipertanyakan oleh rakyat akan berhasil dengan memuaskan. Indikator keraguan rakyat Indonesia pada reformasi politik sebagai bagian solusi dari persoalan rumit krisis nasional dapat dibaca pada hasil Pemilu di era reformasi baik pada Pemilu 7 Juni 1999 maupun Pemilu 5 April 2004 Partai Golkar meraih dukungan yang besar dari rakyat Indonesia. Bahkan pada Pemilu 2004 Partai Golkar mampu keluar sebagai pemenang Pemilu nasional di Indonesia serta memenangkannya di 27 Propinsi. Sementara itu partai-partai politik yang mengusung bendera reformasi kurang mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat sehingga tidak memiliki mandat yang memadai untuk terus melakukan reformasi politik. Hasil Pemilu 2009 memberikan bacaan bahwa partai politik yang menang adalah partai yang dibawah bayang-bayang tokoh mantan militer yakni Partai Demokrat. Sebuah partai politik yang tidak mengusung panji-panji reformasi, tetapi lebih mengambil jalan tengah.

⁷ Lihat Laporan Kompas tentang "Hasil Rekapitulasi Nasional dan Tingkat Partisipasi Pemilu tahun 2009", Kompas edisi 24 Juli 2009.

1. Rendahnya daya tarik siswa pada mata pelajaran PKn
2. Tidak jelasnya substansi dan rincian materi PKn
3. Citra yang doktriner pada pembelajaran PKn
4. Sangat rentan dari intervensi kekuasaan
5. Tidak bisa membangkitkan rasa bangsa dan nasionalisme
6. Secara keilmuan masih dipertanyakan (*debatable*) pohon keilmuan yang menjadi payung dari Pendidikan Kewarganegaraan
7. PKn mewarisi dosa politik rezim-rezim otoriter yang pernah ada di Indonesia.

Belajar dari kegagalan Pendidikan Kewarganegaraan selama Indonesia merdeka, menurut hemat penulis, penting sekali dilakukan kajian yang objektif terhadap pelaksanaan pendidikan PKn di Indonesia disertai dengan adanya keterbukaan untuk menerima secara selektif model-model pendidikan politik dari berbagai ideologi besar yang hidup di dunia modern. Kajian tersebut tidak menempatkan PKn dalam ruang vakum, tetapi diletakan dalam konteks dan keterkaitannya dengan setting perkembangan sosial politik nasional serta pergeseran ideologi dunia. Dengan kerangka pembahasan tersebut lebih memiliki kemungkinan untuk menemukan alternatif formulasi pendidikan politik (PKn) yang dapat mencapai tujuan terpentingnya, yaitu menumbuhkan nasionalisme tetapi sekaligus juga tetap memperhatikan perkembangan global. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi corak nasionalisme suatu bangsa pada dekade tertentu dan wilayah tertentu.

Untuk konteks Indonesia nampaknya masih perlu waktu untuk lahirnya suatu konsensus nasional yang permanen (*settlement consensus*) yang memiliki pijakan kuat pada budaya politik nasional yang matang tanpa membunuh sub-sub budaya politik lokal. Proses integrasi untuk lahirnya budaya politik nasional hingga akhir abad ke-20 nampaknya belum bisa terwujud bahkan setelah reformasi politik tahun 1998, yakni setelah runtuhnya rezim Orde Baru, ada kecenderungan simpul integrasi nasional nampak semakin terpecah-pecah dengan berbagai motivasi; ada yang bermotivasi kedaerahan, agama, kepentingan ekonomi lokal, kepentingan elit lokal dll. Proses untuk "Menjadi Indonesia" belum selesai. Proses menjadi Indonesia masih membutuhkan proses dialektika antar berbagai elemen.⁸

⁸ Lihat, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gausaf, *Menjadi Indonesia, 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Mizan, Jakarta, 2006. Lihat juga, Parakritri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*. Pen. Kompas, Jakarta, 2006.

Proses panjang untuk bisa menjadi Indonesia yang bisa mengakomodasi seluruh elemen yang ada dan hidup di Indonesia, untuk terjadinya proses integrasi masih membutuhkan waktu,⁹ walaupun dalam tiga kali Pemilu di era reformasi sejak Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, memberikan isyarat bahwa antara berbagai kekuatan politik yang diwakili oleh partai-partai politik yang ikut Pemilu sudah menunjukkan bukti empiris untuk bisa membentuk pemerintahan koalisi. Dengan lahirnya tradisi baru pemerintahan koalisi dalam tiga kali Pemilu setelah runtuhnya Orde Baru, memberikan peluang untuk terjadinya proses saling mendekat antar berbagai kekuatan politik yang berbeda garis pemikiran politik dan ideologi sosialnya. Melalui pemerintahan koalisi, memungkinkan untuk terjadinya proses moderasi ideologi sehingga lahirnya suatu konsensus antara berbagai kekuatan politik baik yang ada pada pemerintahan (*the rolling party*) ataupun yang ada pada posisi partai oposisi.

Bermunculannya partai politik yang jumlahnya mencapai 183 partai yang mendaftarkan diri untuk ikut dalam Pemilu tahun 1999, yang kemudian menyisakan 48 partai yang ikut Pemilu. Dan jumlah ini masih terus bertahan jumlahnya yang masih puluhan pada pendaftaran Pemilu tahun 2004 yang kemudian menyisakan 24 partai politik yang bisa ikut pemilu. Dan masih terus bertahan pada Pemilu tahun 2009 dengan jumlah mencapai 36 partai peserta Pemilu (gabungan antara 8 partai lokal di Aceh dengan partai nasional), dapat dibaca sebagai bukti empiris bahwa di Indonesia itu hidup banyak sekali aliran pemikiran politik dan sekaligus kelompok-kelompok kekuatan politik. Aliran-aliran politik dan kekuatan-kekuatan politik tersebut di Indonesia selama Indonesia merdeka hingga awal abad ke-21 yang telah mengadakan Pemilu sebanyak 10 kali (Pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009),¹⁰ Nampaknya belum mampu mendorong untuk terjadinya pelembagaan politik (*Political institutionalisation*) secara matang.

⁹ Lihat, Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, Pen. PT Pustaka Utama Grafiri, Jakarta, tahun 1991.

¹⁰ Lihat, *Almanak Parpol Indonesia (API) Pemilu 1999*. Edisi Revisi. Lihat juga *Partai Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program*, Pen. Kompas, Jakarta, Tahun 1999. Lihat, *Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004*, Pen. Kompas, Jakarta, Tahun 2004. Serta *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, Kompas, Jakarta, Tahun. 2004.

Belum matangnya proses pelembagaan politik di Indonesia juga dapat dilihat dari cairnya berbagai bentuk koalisi yang pernah terjadi dalam rezim yang pernah berkuasa setelah reformasi tahun 1999. Pengalaman tiga kali Pemilu pasca reformasi tahun 1999 yang diikuti oleh terbentuknya kabinet hasil koalisi menunjukkan terjadinya bentuk koalisi yang terbelah antara koalisi di kabinet dengan koalisi di parlemen. Sering kali terjadi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah hasil koalisi tidak diikuti dukungan politik oleh partai pendukung koalisi yang ada di parlemen.

Di samping persoalan belum matangnya pelembagaan politik di Indonesia, sistem politik nasional Indonesia mengalami suatu keadaan yang disebut sebagai gejala "*floating state*", atau "*failur state*". Yakni suatu kondisi dimana ada gap yang dalam antara struktur politik Indonesia modern dengan kultur politik yang hidup di Indonesia. Sebenarnya kemungkinan untuk terjadinya gap antara struktur politik dan budaya politik juga terjadi pada negara-negara yang sudah terlebih dahulu menerapkan sistem politik demokrasi, seperti juga halnya di Inggris dan negara Amerika Serikat. Namun di dua negara yang sering dijadikan *icon* bagi demokrasi ini dalam perjalannya akhirnya terjadi proses harmonisasi serta proses pelembagaan politik secara bertahap. Persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terkait dengan masalah budaya politik dan struktur politik, juga adanya kesenjangan antara struktur politik yang ada dengan kebudayaan politik yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan. Kesenjangan antara *political culture* dan *political structure* sering sekali terjadi pada masyarakat Indonesia dan bertambah kompleks, masyarakat Indonesia masih dalam masa transisi demokrasi.¹¹

C. Beberapa Perspektif tentang *Political Education*

Penegasan tentang urgensi pendidikan politik (*political education*) antara lain disampaikan oleh Amy Gutmann¹²

"... we can conclude that political education -- the cultivation of the virtues, knowledge, and skills necessary for political participation--has moral primacy over others purposes of public education in a democratic society. Political education prepares

¹¹ Lihat, Chris Manning, *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Aspek Reformasi Sosial dan Krisis*, LKIS, Yogyakarta, tahun 2000.

¹² Lihat Amy Gutmann, *Democratic Education*, Princeton University Press, Princeton New Jersey, 1999: 287-291.

citizens to participate in consciously reproducing their society and conscious social reproduction is the ideal not only of democratic education but also of democratic politics"

Adapun tentang berbagai perspektif tentang *political education* dan *political socialization* dari para sarjana yang memberikan perhatian pada bidang pendidikan politik kiranya dapat diikuti dalam uraian berikut ini.

Term *political socialization* dan *political education* menurut pandangan John J. Patrick, adalah merupakan term yang berbeda. Menurut John J. Patrick:

*"Political socialization refers to the process by which people learn to adopt the norms, values, attitudes, and behaviors accepted and practiced by the on going system, political socialization refers to the individual's acquisition of his society's political culture or norms for managing "the authoritative distribution of advantages and disadvantages". The end towards which this process functions is the development of individuals who accept approved motives, habits, and values relevant to the political system of their society and who transmit these norms to future generations"*¹³

Pendapat lainnya, Ben Rosemond:

*"political socialization as the process or the set of processes, through which people learn about politics and acquire political values. There is much dispute about which processes are significant and about when in the life cycle the most important socialisation takes place"*¹⁴

Sementara itu sarjana lain, Bay, menyatakan bahwa *political education* lebih luas daripada *political socialization*, lebih lanjut dia menyatakan *"as with all education, political science education must aim at liberating the student from the blinders of the conventional wisdom, from political totems and taboos, so that may make the basic choice of how to live and of political ideals as an independent person with optimal critical powers."*

Sedangkan menurut Pranger, menyatakan bahwa *"a broad political education emphasizes the artificiality of political order and the citizen as creative actor within this order"*. Pandangan yang senada dikemukakan oleh Entwistle, ia berpendapat bahwa *"political*

¹³ Lihat Stanley Allen Renshon, *Handbooks of Political Socialization Theory and Research*, The Free Press a division of Macmillan Publishing Co. Inc. London, 1977, hal. 191.

¹⁴ Lihat Ben Rosamond, *Politics: an Introduction Second Edition*, Routledge: London, 2002, hal. 58.

education, in contrast to socialization, should help youngsters learn to question basic assumptions of their polity and to consider alternative answers".

Perbedaan makna antara *political socialization* dengan *political education* sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki implikasi pengembangan kurikulum dan desain instruksional, antara *political socialization* dengan *political education*. Menurut John J Patrick, letak perbedaannya adalah, bahwa;

"student of political socialization should be concerned primarily with question about the maintenance of political systems, about the transmission of political orthodoxy. They should ask how individuals learn to conform to the sociopolitical status quo so that political norms are observed and established political roles are performed".

Sedangkan pendidikan politik (*political education*) memiliki perhatian yang lebih luas. Pendidikan politik tidak hanya membatasi individu untuk belajar mendukung tataatan politik yang berlaku, tetapi juga meminta individu untuk belajar menciptakan dan merubah tataatan politik (*they should ask not merely how individuals learn to conform so that political orders endure; but they also should ask how individuals learn to create and to change political orders*) (John J Patrick, 1977: 193).

Menurut pendapat Freed I. Greenstein, studi tentang *political socialization* memiliki tempat dalam studi ilmu politik di Amerika Serikat sejak tahun 1968. Dari pelacakan yang dilakukan oleh Greenstein di kalangan para sarjana ilmu politik terdapat beragam pendapat tentang definisi dari *political Socialization*. Menurutnya paling tidak ada empat perhatian tentang variasi definisi *political socialization*;

1. *The study of Children's political socialization orientations. To define the study of political socialization as "the political study of Children." Nevertheless, just as "anthropology" is usually defined formally in abstract intellectual terms (as the study of "culture" or of "social structure") but tends informally to mean "the study of nonliterate populations." Political socializations also has a mundane operational definition; "the study of pre-adult orientations to the adult politycal process."*

2. *The study of the acquisition of prevailing norms. Sometimes the phrase is used to apply quite narrowly to studies of the way the prevailing norms of a political system become the norms of the new members of that system. Here the usage parallels one of the meanings sociologists give to the more general term "socialization." The political subset of socialization is also sometimes called "politicization." In any event, the focus is on the acquisition of norm-consistent behavior.*
3. *Sometimes "political socialization" is used more broadly to refer to the study of any political learning what soever of conformity or deviance, and at any stage in the life cycle."*
4. *Finally, "political socialization" sometimes refers to actual observations of socialization processes, in any of the above senses, taking into account both the socialized and the agents of socialization.¹⁵*

Dalam konteksnya dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada warga negara, dimaknai sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul, nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Alfian, 1986: 235). Pendidikan politik dalam konteks kegiatan pemilu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan terencana, dengan sadar untuk memberikan kesadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih (Alfian, 1991: 245).¹⁶ Sementara itu Good merumuskan bahwa pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap berbagai problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik (Dictionary of Education, 1973: 67).

Rumusan lain dikemukakan oleh Ustman (2000). Pendidikan politik adalah upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik pada setiap warga negara. Membentuk dan menum-

¹⁵ lihat Louis j. Cantori, Andrew H. Ziegler, Jr. Political socialization a Note on the Ambiguity of Political socialization: Defenitions, Cruticims, and Strategics of Inquiry, dalam Comparative Politics, hal. 191-192

¹⁶ Lihat, Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, Profil Budaya Politik Indonesia, Pen. PT Pustaka Utama Grafiri, Jakarta, tahun 1991, hal. 20-32.

buhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, kemampuan berpartisipasi politik secara aktif dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.¹⁷

D. Pendidikan Politik dan Reformasi Sistem Politik Nasional

Berbicara tentang eksistensi pendidikan politik di Indonesia, yang diselenggarakan secara formal melalui Pendidikan Kewarganegaraan, sebenarnya secara yuridis telah memiliki landasan yang kuat. Hal tersebut dikarenakan amanat untuk mengadakan pendidikan politik (PKn) sudah dituangkan dalam kesepakatan politik yang dibuat oleh DPR dan pemerintah yang dituangkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, khususnya pada Bab X pasal 37, antara lain dinyatakan bahwa, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan.¹⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang ini, maksud diadakannya Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Jika eksistensi PKn hanya dilihat dari sisi adanya dasar hukum bagi diselenggarakannya mata pelajaran, memang dapat dinyatakan bahwa keberlangsungan PKn di Indonesia sudah terjamin, minimal untuk beberapa tahun kedepan. Tetapi pengalaman memberikan pelajaran bahwa "daya hidup" PKn itu serta "prospeknya" tidak cukup hanya bermodalkan memiliki landasan yuridis bagi penyelenggaraannya. Untuk menopang eksistensi PKn, di dalamnya dibutuhkan adanya independensi dari intervensi rezim yang berkuasa, materi yang standar, model pembelajaran yang kontekstual serta hadirnya kehidupan politik yang demokratis. Dengan rumusan lain, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan PKn tidak dapat berdiri sendiri, terkait dengan sistem pendidikan nasional serta sistem politik yang berlaku.

Eksistensi dan prospek PKn di Indonesia meminjam perpektif

¹⁷ Lihat juga Utsman Abdul Mu'iz, Tarbiyah Siyasah 'Inda Jama'ah Al Ikhwana Al Musli,min, terjemah, Pendidikan Politik Ikhwanaul Muslimin. Penerbit Intermedia: Solo, 2000, hal. 87.

¹⁸ Lihat Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Henry Gioux,¹⁹ ketika berbicara tentang pengaruh ideologi dan kultur yang hidup pada suatu bangsa pada dunia pendidikan, dapat dinyatakan akan sangat dipengaruhi oleh ideologi (paradigma) pendidikan yang dianut oleh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat dunia pendidikan. Mengikuti perspektif Giroux, kegagalan pendidikan politik (PKn) di Indonesia yang telah diselenggarakan selama Indonesia merdeka, adalah ikut ditentukan di antaranya domain paradigma konservatif dan liberal dalam ideologi pendidikan di Indonesia. Indikator yang sangat kentara dari diadanya paradigma konservatif adalah menjadikan pendidikan sebagai alat untuk bisa mewariskan nilai-nilai yang dianggap mapan yang menguntungkan pihak yang berkuasa.

Sedangkan paradigma liberal yang berpandangan bahwa pendidikan berfungsi untuk menjamin tetap berfungsinya sistem ekonomi liberal juga sangat nampak dalam arah kebijakan pendidikan di Indonesia, bahkan penetrasinya sampai ke pendidikan politik. Misi pendidikan politik adalah untuk melakukan penjinakan pada pemimpin warga negara supaya mendukung proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan menajaukan pelajar dan mahasiswa dari dunia politik untuk menciptakan stabilitas politik. Dengan kata lain pendidikan (poliitik) menjadi subordinasikan dari kepentingan pertumbuhan ekonomi. Proses pendidikan dengan misi seperti itu telah melahirkan suatu generasi bangsa Indonesia yang apatis pada masalah kebangsaan yang ikut memberikan andil pada munculnya krisis politik nasional.

Belajar dari kegagalan praktek pendidikan politik di masa Orde lama dan Orde Baru, pada masa kini dan mendatang (PKn) seharusnya sebagai bagian penting dari pendidikan politik di tengah berlangsungnya proses reformasi politik di Indonesia, memiliki peranan penting untuk ikut mendorong lahirnya budaya politik baru untuk menuju Indonesia baru. Budaya politik baru yang berintikan pada lahirnya sikap kritis di satu sisi serta sikap loyal pada sistem politik nasional. Sikap kritis yang berakar pada adanya kemerdekaan bagi rakyat adalah merupakan ruh dari hidupnya kedaulatan di tangan rakyat. Budaya politik baru tersebut sangat dibutuhkan ketika bangsa ini diterpa krisis multidimensi, bangsa ini membutuhkan hadirnya generasi baru dengan

¹⁹ Lihat Mansour Fakhri, *Ideologi dalam pendidikan*, kata pengantar pada buku *Ideologi-ideologi pendidikan*, karya William F. O'Neil, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

semangat baru, gagasan yang cemerlang, dan gencerasi yang tercerahkan. Krisis multidimensi yang menimpa bangsa Indonesia²⁰ semenjak medio 1997 sampai tahun 2004 yang sudah berlangsung enam tahun, memberikan inspirasi serta menghentakkan kesadaran intelektual, untuk menayakan lebih mendalam, tajam, dan sekaligus kritis, tentang suatu persoalan yang sangat mendasar, yakni tentang eksistensi negara Indonesia, inheren di dalamnya bangunan politik Indonesia sebagai suatu *nation state*.

Pertanyaan kritis tersebut tidak hanya berhenti pada persoalan-persoalan yang bersifat permukaan seperti tentang kesalahan kebijakan pembangunan pendidikan, kebijakan ekonomi, kesalahan pilihan prioritas pembangunan di Indonesia, kesalahan model pembangunan politik, persoalan moralitas para penyelenggara pemerintahan yang berujung pada lahirnya budaya KKN, tetapi lebih pada persoalan yang mendasar. Persoalan mendasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bangunan politik Indonesia. Dalam konteks ini, pertanyaan kritis tersebut sampailah pada suatu titik yang memerlukan kemungkinan untuk lahirnya pemikiran kritis-alternatif tentang model bangunan politik Indonesia. Pemikiran kritis tentang bangunan politik Indonesia, untuk pada akhirnya melahirkan suatu perspektif teoritis yang orisinal menjadi keniscayaan mengingat sejak dekade 1990-an, nilai-nilai politik di Indonesia telah memudar dan kekuatan-kekuatan lain yang segera mengisi kekosongan tersebut yaitu kesadaran etnis yang semakin meningkat dan peningkatan komitmen keagamaan terutama yang fundamentalis di wilayah-wilayah tertentu (Robert A. Scalapino, 1996: 1).²¹

Ikhtiar untuk sampai pada perumusan teori politik baru yang orisinal dapat dimulai dengan langkah pertama, yaitu dengan menanyakan adakah kelemahan pada bangunan politik Indonesia? Mengapa lum-puh, tak mampu bekerja efektif untuk menyelesaikan persoalan mendasar dan aktual yang dihadapi oleh bangsa ini? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah unsur-unsur utama yang membentuk bangunan politik Indonesia, bagaimana poses menjadi Indonesia, asumsi-asumsi apa yang ada di balik bangunan yang bernama Indonesia tersebut? Dari

²⁰ Lihat Chris Manning & Peter Van Diermen, *Indonesia di tengah transisi, aspek-aspek sosial reformasi dan krisis*, LKIS, Yogyakarta, 2000, hal. 1-15.

²¹ Robert A. Scalapino, *Orasi Ilmiah*, memperingati 25 tahun CSIS tanggal 18-19 September 1996.